

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 7, no 1, Juni 2026

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Evaluasi Gapura Emas Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kantor Purwosari Pasuruan

Maria Ulfa¹, Agus Prianto²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan

ulfa6135@gmail.com, agus.prianto@yudharta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Gapura Emas dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Penerapan TNDE merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi persuratan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan TNDE, faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TNDE di Kecamatan Purwosari telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi persuratan. Penggunaan TNDE membantu proses pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan disposisi menjadi lebih cepat, tertib, efisien, serta terdokumentasi. Implementasi tersebut didukung oleh kegiatan sosialisasi, surat internalisasi, dan surat edaran, serta ketersediaan admin TNDE dan staf pengelola surat pada masing-masing seksi. Aplikasi TNDE telah terintegrasi dengan GAPURA EMAS dan dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Dari aspek disposisi, aparatur menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam beradaptasi dengan sistem elektronik, sedangkan dari aspek struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pengelolaan persuratan. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana teknologi, sosialisasi, komitmen aparatur, integrasi sistem, dan SOP. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan disposisi kepada pimpinan, serta masih adanya penggunaan mekanisme manual. Secara keseluruhan, TNDE melalui GAPURA EMAS telah mendukung SPBE, tetapi masih memerlukan optimalisasi agar penerapannya lebih konsisten dan efektif.

Kata kunci: Evaluasi, Gapura, Emas, SPBE.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of GAPURA EMAS in supporting the Electronic-Based Government System (SPBE) through the application of the Electronic Official Correspondence System (TNDE) in Purwosari District, Pasuruan Regency. The implementation of TNDE represents a government effort to enhance effectiveness, efficiency, and administrative orderliness in correspondence management through the use of information technology. This study employs a qualitative descriptive approach to gain insight into the execution of TNDE, as well as the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The results indicate that TNDE implementation in Purwosari District has proceeded well and contributed to improved effectiveness in correspondence administration. The use of TNDE has streamlined the management of incoming mail, outgoing mail, and dispositions, making the process faster, more organized, efficient, and well-documented. Implementation has been supported by outreach activities, internal directives, and circular letters, alongside the availability of TNDE administrators and dedicated correspondence staff in each section. The TNDE application is integrated with GAPURA EMAS and accessible via both computers and smartphones. Regarding dispositions, staff have demonstrated commitment and readiness to adapt to the electronic system, while Standard Operating Procedures (SOPs) are in place to guide correspondence management. Supporting factors include the availability of technological infrastructure, outreach efforts, staff commitment, system integration, and SOPs. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resources, a reliance on leadership for dispositions, and the continued use of manual mechanisms. Overall, TNDE via GAPURA EMAS has supported the SPBE, though further optimization is required to ensure more consistent and effective implementation

Keywords: Evaluation, Gapura, Emas, SPBE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.(Fitriani, 2021) Transformasi digital dalam pemerintahan tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya modernisasi perangkat kerja, tetapi telah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal melalui konsep *Electronic Government* (E-Government), yaitu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas proses administrasi, pelayanan publik, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Implementasi e-government menuntut adanya perubahan pola kerja birokrasi dari sistem manual menuju sistem elektronik yang terintegrasi,

sehingga proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah dipantau. (Suryana et al., 2025)

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan secara nasional diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu. SPBE tidak hanya menekankan penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan pemerintahan, tetapi juga menghendaki adanya integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi pemerintahan idealnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme manual, mempercepat alur birokrasi, meningkatkan ketertelusuran dokumen, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. (Imania & Haryani, 2021)

Salah satu aspek penting dalam implementasi SPBE adalah digitalisasi tata naskah dinas. Administrasi persuratan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan karena hampir seluruh proses koordinasi, komunikasi kedinasan, penyampaian informasi, pemberian instruksi, hingga pengarsipan membutuhkan dokumen resmi. Oleh karena itu, perubahan dari tata naskah dinas konvensional menuju tata naskah dinas elektronik menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung birokrasi yang modern. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) memungkinkan proses pembuatan, pengiriman, penerimaan, disposisi, hingga pengarsipan surat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Implementasi tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2021 dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar lebih tertib, standar, efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. (Saifullah Samad et al., 2025)

Dalam konteks pemerintahan daerah, kecamatan memiliki posisi strategis karena

menjadi salah satu perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi dengan desa atau kelurahan. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan pada tingkat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas komunikasi dan pertukaran informasi kedinasan di tingkat kecamatan relatif tinggi. Surat masuk dan surat keluar menjadi instrumen penting dalam mendukung koordinasi antarlembaga, penyampaian kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemberian tugas, serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, penerapan sistem persuratan elektronik pada tingkat kecamatan menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespons kebutuhan transformasi digital tersebut melalui inovasi GAPURA EMAS, yang merupakan platform integrasi berbagai aplikasi pemerintahan dan dapat diakses melalui satu akun pengguna (*single user*). (Zuhriyah et al., 2026) Kehadiran GAPURA EMAS merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan konsep “Gerbang Satu Pintu” bagi berbagai layanan dan aplikasi pemerintahan. Salah satu layanan yang terintegrasi dalam platform tersebut adalah Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi persuratan, meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mempercepat penyampaian informasi, mengurangi penggunaan kertas, serta memperkuat sistem pengelolaan arsip pemerintahan. Data rekapitulasi aplikasi TNDE Kecamatan Purwosari tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas persuratan elektronik telah berlangsung dalam jumlah dan jenis dokumen yang beragam. Pada kategori surat masuk, surat biasa menjadi jenis surat yang paling dominan dengan persentase sebesar 59,2%, diikuti surat undangan sebesar 32,4%, sedangkan jenis surat lainnya sebesar 8,4%, yang mencakup surat pengumuman, surat edaran, surat pengantar, dan surat tugas. (Siregar et al., 2026)

Sementara itu, pada kategori surat keluar, surat biasa mencapai 48,8%, surat

pengantar sebesar 22,0%, surat undangan sebesar 8,7%, surat keterangan sebesar 1,7%, dan kategori lainnya sebesar 3,0%, yang mencakup nota dinas, NPKND (Pengantar Produk Hukum), surat tugas, dan uji coba surat tugas. Data tersebut memperlihatkan bahwa TNDE telah dimanfaatkan untuk mengelola berbagai jenis naskah kedinasan dalam aktivitas pemerintahan di Kecamatan Purwosari. Keberagaman jenis dokumen tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa implementasi TNDE telah mengakomodasi kebutuhan administrasi persuratan di tingkat kecamatan. Pengelompokan dan standardisasi jenis naskah dinas juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. (Hendika et al., 2026) Tata naskah dinas mencakup berbagai bentuk dokumen resmi, antara lain naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Dengan dukungan sistem elektronik, pengelolaan berbagai jenis dokumen tersebut seharusnya dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi mulai dari pembuatan, pengiriman, penerimaan, disposisi, hingga pengarsipan.

Namun, fakta bahwa sebagian proses masih dilakukan secara manual menunjukkan bahwa efektivitas TNDE tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan dan penggunaan aplikasi, tetapi perlu dilihat dari kualitas implementasinya dalam keseluruhan proses kerja birokrasi. Permasalahan tersebut penting dianalisis karena implementasi suatu kebijakan atau sistem pemerintahan digital pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi TNDE. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Wulandari & Pertiwi, 2025) Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dan prosedur penggunaan sistem dapat dipahami oleh aparatur. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, informasi, serta dukungan lainnya yang diperlukan dalam implementasi. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam

menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur, pembagian kewenangan, standar operasional, serta mekanisme kerja yang mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara kebijakan digitalisasi administrasi pemerintahan dengan praktik implementasi di tingkat kecamatan. GAPURA EMAS dan TNDE telah menyediakan infrastruktur digital untuk mendukung SPBE, sementara aktivitas persuratan di Kecamatan Purwosari juga telah menggunakan aplikasi tersebut. Namun, masih ditemukannya penggunaan dokumen fisik dalam proses disposisi menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menghilangkan mekanisme manual. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dievaluasi karena keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja birokrasi secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi implementasi GAPURA EMAS dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pasuruan, khususnya melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kantor Kecamatan Purwosari. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan TNDE, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya berdasarkan perspektif George C. Edward III, serta menganalisis sejauh mana penerapan TNDE telah mendukung efektivitas, efisiensi, dan integrasi administrasi pemerintahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Purwosari dalam mengoptimalkan pemanfaatan GAPURA EMAS dan TNDE, khususnya dalam mengurangi praktik administrasi berbasis kertas dan memperkuat penyelenggaraan SPBE pada tingkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam

implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang terintegrasi dalam platform GAPURA EMAS di Kantor Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. (Azhari et al., 2026) Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran statistik, tetapi pada pemahaman terhadap praktik, pengalaman, kebiasaan, dan pandangan aparatur dalam melaksanakan administrasi persuratan berbasis elektronik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran fenomena secara alamiah berdasarkan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam memahami suatu peristiwa sosial secara menyeluruh dalam konteks alamiah. (Safrudin et al., 2023) Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang beralamat di Jl. Kawedanan No. 01 Purwosari. Pemilihan lokasi didasarkan pada temuan awal mengenai penerapan TNDE yang telah berjalan secara digital, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan media kertas, khususnya pada proses disposisi surat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi administrasi pemerintahan dengan praktik kerja aparatur. Oleh karena itu, lokasi penelitian dipandang relevan untuk mengkaji implementasi TNDE dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan penggunaan TNDE dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, khususnya proses penerimaan, pengelolaan, pengiriman, dan disposisi naskah dinas, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi TNDE. Analisis faktor implementasi menggunakan model George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana TNDE telah diterapkan secara optimal serta faktor yang menyebabkan masih berlangsungnya praktik administrasi secara manual. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap aparatur yang terlibat dalam penggunaan TNDE dan GAPURA EMAS. Informan dipilih secara

purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses administrasi persuratan, yang meliputi Camat Purwosari, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, operator atau admin TNDE/GAPURA EMAS, serta pegawai yang terlibat dalam proses disposisi surat. Data primer diarahkan untuk menggali pemahaman, pengalaman, sikap, dan praktik aparatur dalam menggunakan sistem elektronik. (Kuswarno, 2007)

Data sekunder diperoleh melalui peraturan dan kebijakan terkait SPBE dan tata naskah dinas, SOP penggunaan TNDE, arsip surat masuk dan surat keluar, laporan penggunaan GAPURA EMAS, struktur organisasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Sugiyono (2018:137) dalam Hermanto et al. (2020) menjelaskan bahwa data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung alur pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penggunaan aplikasi TNDE, proses disposisi, serta praktik pengarsipan elektronik dan manual. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman aparatur terhadap TNDE, proses implementasi, kendala penggunaan aplikasi, alasan masih digunakannya disposisi berbasis kertas, serta dukungan organisasi terhadap SPBE. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan SOP, arsip persuratan, dokumen kebijakan, tangkapan atau dokumentasi penggunaan aplikasi, laporan administrasi, serta dokumen kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang saling melengkapi sekaligus meningkatkan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu sosial yang memiliki peran penting dalam memahami bagaimana pemerintah mengelola berbagai

urusan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan publik. Secara umum, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses kerja sama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam merumuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai kebijakan serta program yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administratif dalam arti sempit, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan pelayanan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan kesejahteraan publik. Dalam perkembangannya, administrasi publik mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Pada awal perkembangannya, administrasi publik lebih banyak dipahami sebagai aktivitas pemerintahan yang menekankan aspek birokrasi, struktur organisasi, pembagian kerja, prosedur, dan kepatuhan terhadap aturan. Pemerintah ditempatkan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. (Tanjung, 2022)

Orientasi tersebut kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Administrasi publik modern tidak lagi hanya berorientasi pada bagaimana pemerintah menjalankan prosedur, tetapi juga pada bagaimana pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Administrasi publik berkaitan erat dengan keberadaan negara sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai penyelenggara berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta program bantuan sosial. Keberhasilan administrasi publik dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. (Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Nurmandi, 2018)

Salah satu aspek penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bentuk nyata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dapat menilai kualitas pemerintahan melalui pengalaman mereka ketika memperoleh pelayanan. Pelayanan yang mudah diakses, cepat, adil, transparan, dan responsif menunjukkan adanya praktik administrasi publik yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak transparan, diskriminatif, atau sulit diakses dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Administrasi publik juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu yang dihadapi masyarakat. Dalam prosesnya, administrasi publik berperan dalam menerjemahkan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh administrasi publik yang efektif. Implementasi kebijakan membutuhkan organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, koordinasi antarlembaga, sistem informasi yang baik, serta mekanisme pengawasan yang efektif. (Diandra, 2019)

Dalam perspektif administrasi publik, sumber daya merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, teknologi, serta kewenangan. Pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah dituntut untuk menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat secara bertanggung jawab karena pada dasarnya setiap anggaran publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan besar terhadap praktik administrasi publik. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Digitalisasi administrasi dapat menciptakan proses pelayanan yang lebih

cepat, terdokumentasi, mudah dipantau, dan mengurangi ketergantungan terhadap prosedur manual. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan transparansi karena informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan pelayanan dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. (Mustaqem & Rahman, 2024)

Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu konsep penting dalam administrasi publik karena berkaitan dengan proses untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan, program, kegiatan, atau pelayanan publik telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan, hambatan, penyimpangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menilai nilai, manfaat, efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, dikembangkan, atau bahkan dihentikan. Oleh sebab itu, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. (Saputra & Rahmat, 2024)

Dalam konteks administrasi publik, evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya menggunakan sumber daya publik dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui apakah sumber daya yang telah digunakan benar-benar menghasilkan manfaat sebagaimana yang telah direncanakan. Evaluasi memberikan informasi mengenai hubungan antara input, proses, output, dan outcome dari suatu program.

Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal serta apakah program yang dilaksanakan telah memberikan perubahan yang diharapkan. Evaluasi juga dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap program pemerintah memiliki konsekuensi terhadap penggunaan anggaran, tenaga, waktu, sarana, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi membantu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program secara lebih objektif dan sistematis. (Ridwan et al., 2013)

Dalam pelaksanaannya, evaluasi tidak hanya dilakukan setelah suatu program selesai. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan. Evaluasi pada tahap awal dapat digunakan untuk menilai kesiapan suatu program sebelum dilaksanakan. Evaluasi selama pelaksanaan dapat digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu, evaluasi setelah pelaksanaan dapat digunakan untuk mengetahui hasil dan dampak program terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi merupakan proses yang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi kegiatan yang dilakukan pada akhir program. Salah satu aspek utama dalam evaluasi adalah efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila hasil pelaksanaannya sesuai atau mendekati tujuan yang telah direncanakan. Dalam administrasi publik, efektivitas menjadi ukuran penting karena pemerintah tidak cukup hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan prosedur, tetapi harus memastikan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Alif & Ahmadi, 2024)

Selain efektivitas, evaluasi juga memperhatikan aspek efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Program yang efisien adalah program yang mampu menghasilkan manfaat optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional. Dalam konteks

pemerintahan, efisiensi sangat penting karena sumber daya publik memiliki keterbatasan. Pemerintah harus mampu menggunakan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan sarana secara tepat sehingga tidak terjadi pemborosan. Aspek berikutnya adalah ketepatan sasaran. Evaluasi suatu program publik perlu melihat apakah program tersebut telah diterima oleh kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran. Ketepatan sasaran menjadi sangat penting dalam program bantuan sosial karena kesalahan dalam menentukan penerima dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Apabila masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima, sementara masyarakat yang tidak memenuhi kriteria memperoleh bantuan, maka tujuan program tidak dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi juga berkaitan dengan kecukupan atau adequacy, yaitu sejauh mana suatu program mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar munculnya kebijakan. Sebuah program mungkin berhasil mencapai target administratif, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi harus melihat lebih jauh daripada sekadar jumlah kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi perlu mempertimbangkan apakah program tersebut benar-benar memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya, terdapat aspek responsivitas, yaitu kemampuan suatu program atau kebijakan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan bagaimana masyarakat merasakan manfaat program, apakah kebutuhan mereka telah terpenuhi, serta bagaimana pemerintah merespons berbagai keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Evaluasi Gapura Emas Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kantor Purwosari Pasuruan

Evaluasi implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kecamatan Purwosari dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan administrasi persuratan

berbasis elektronik telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dalam penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi TNDE secara umum telah berjalan dan memberikan perubahan terhadap proses administrasi persuratan, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Dari aspek **komunikasi**, penerapan TNDE di Kecamatan Purwosari menunjukkan kondisi yang relatif baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyampaikan kebijakan penggunaan TNDE melalui kegiatan sosialisasi dan internalisasi kepada aparatur. Penyampaian informasi tersebut diperkuat dengan adanya surat internalisasi penerapan aplikasi TNDE, surat undangan kegiatan sosialisasi atau internalisasi, serta surat edaran mengenai penggunaan TNDE sebagai sarana produksi naskah dinas. (Hadi & Widnyani, 2024)

Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menggunakan aplikasi, tetapi juga menjelaskan mekanisme pengelolaan surat secara elektronik dan kaitannya dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui saluran formal dan terstruktur. Aparatur memperoleh informasi mengenai perubahan mekanisme kerja dari sistem persuratan manual menuju sistem elektronik. Kejelasan informasi menjadi penting karena perubahan sistem administrasi membutuhkan pemahaman yang sama di antara seluruh pelaksana. Apabila aparatur tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur penggunaan aplikasi, maka dapat terjadi kesalahan dalam pengelolaan surat, keterlambatan proses, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks Kecamatan Purwosari, sosialisasi dan dokumen resmi menjadi instrumen yang membantu aparatur memahami prosedur penggunaan TNDE. Oleh karena itu, aspek komunikasi dapat dinilai sebagai salah satu faktor pendukung implementasi TNDE. (Rusdy & Flambonita, 2023)

Pada aspek sumber daya, hasil evaluasi menunjukkan adanya kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Kecamatan Purwosari telah menyediakan sumber daya manusia yang bertugas mengelola TNDE, yaitu satu orang admin TNDE dan staf pada masing-masing seksi yang bertanggung jawab terhadap administrasi persuratan. Keberadaan personel tersebut menunjukkan bahwa secara organisatoris telah terdapat pembagian tugas dalam penggunaan aplikasi. Namun, jumlah pelaksana yang terbatas menyebabkan proses administrasi elektronik masih memiliki ketergantungan terhadap personel tertentu. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menjadi lebih terlihat dalam proses disposisi surat. Kewenangan disposisi berada pada Camat atau Sekretaris Kecamatan sehingga ketika pejabat yang memiliki kewenangan tersebut tidak berada di kantor, proses surat dapat mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum secara otomatis menghilangkan seluruh hambatan administratif. Aplikasi dapat mempercepat proses penyampaian dan pengelolaan dokumen, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan aparatur dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pelaksana. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan optimalisasi mekanisme pelaksanaan kewenangan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas TNDE. (Amalia et al., 2025)

Dari sisi sarana dan prasarana, implementasi TNDE justru menunjukkan dukungan yang cukup baik. Aplikasi TNDE telah terintegrasi dengan GAPURA EMAS dan dapat digunakan melalui komputer maupun telepon pintar. Selain itu, penggunaan Telegram sebagai media notifikasi membantu aparatur memperoleh pemberitahuan ketika terdapat surat masuk. TNDE juga telah mendukung berbagai proses utama administrasi persuratan, mulai dari surat masuk, surat keluar, hingga disposisi elektronik. Dengan adanya fasilitas tersebut, proses administrasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dokumen fisik. Ketersediaan sarana tersebut memberikan beberapa manfaat terhadap pelaksanaan administrasi. Aparatur dapat mengakses surat dengan lebih fleksibel, proses distribusi dokumen menjadi lebih mudah, dan administrasi dapat terdokumentasi secara elektronik. Integrasi aplikasi juga menunjukkan adanya upaya

untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih terhubung. Dengan demikian, dari aspek fasilitas, TNDE telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan administrasi berbasis elektronik. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas teknologi tetap harus diikuti dengan kemampuan aparatur dalam menggunakannya agar teknologi yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal. (Maharani et al., 2024).

Selanjutnya, aspek **disposisi aparatur** menunjukkan hasil yang positif. Disposisi dalam teori Edward III berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menerima serta melaksanakan suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Purwosari memiliki sikap yang cukup positif terhadap penerapan TNDE. Hal tersebut terlihat dari kesediaan aparatur mengikuti kegiatan sosialisasi serta kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan sistem kerja dari administrasi berbasis kertas menuju administrasi elektronik. Penerimaan aparatur terhadap TNDE merupakan faktor penting karena perubahan sistem administrasi tidak hanya menyangkut perubahan alat yang digunakan, tetapi juga perubahan kebiasaan dan pola kerja. Aparatur yang sebelumnya terbiasa menggunakan dokumen fisik harus menyesuaikan diri dengan sistem elektronik. Dalam penelitian ini, aparatur telah mulai menggunakan TNDE dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemauan untuk mengikuti kebijakan digitalisasi administrasi. Dengan demikian, disposisi aparatur menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan implementasi TNDE di Kecamatan Purwosari. (Supriyanto & Fitria, 2022)

Namun, sikap positif tersebut tetap perlu dipertahankan melalui pembinaan dan pembiasaan secara berkelanjutan. Implementasi sistem elektronik tidak cukup hanya dilakukan pada tahap awal penerapan, tetapi membutuhkan konsistensi dalam penggunaan sehari-hari. Semakin terbiasa aparatur menggunakan TNDE, semakin besar kemungkinan sistem tersebut dapat menjadi bagian integral dari proses administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan pendampingan aparatur tetap diperlukan agar penerapan TNDE tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi sistem kerja yang digunakan secara efektif. Aspek berikutnya

adalah struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TNDE di Kecamatan Purwosari telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengelolaan surat masuk dan surat keluar. SOP memberikan pedoman mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh aparatur sehingga proses administrasi memiliki alur yang jelas. Pada pengelolaan surat masuk, proses dimulai dari penerimaan surat oleh admin TNDE, verifikasi, disposisi oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan, kemudian pendistribusian kepada seksi yang dituju. (Warman et al., 2022)

Sementara itu, surat keluar melalui proses penyusunan konsep, pemeriksaan, persetujuan, penandatanganan elektronik, pengiriman melalui TNDE, dan pengarsipan secara elektronik. Keberadaan SOP menjadi penting karena dapat menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas. Setiap aparatur memiliki pedoman mengenai tahapan yang harus dilakukan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan prosedur antarpegawai. SOP juga memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses administrasi persuratan. Berdasarkan hasil observasi, aparatur telah melaksanakan pengelolaan surat berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan sehingga proses surat masuk dan surat keluar dapat berjalan secara lebih tertib dan terdokumentasi secara elektronik. Meskipun struktur birokrasi telah didukung oleh SOP yang jelas, masih terdapat hambatan pada proses disposisi. Ketika Camat atau Sekretaris Kecamatan sedang melaksanakan tugas di luar kantor, proses disposisi dapat mengalami keterlambatan karena kewenangan tersebut masih menunggu pejabat yang bersangkutan. (Khairani & Feryansyah, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SOP belum sepenuhnya menjamin kecepatan pelaksanaan apabila terdapat ketergantungan terhadap pejabat tertentu. Dengan demikian, evaluasi terhadap struktur birokrasi tidak hanya perlu melihat keberadaan SOP, tetapi juga bagaimana kewenangan dan mekanisme kerja dapat mendukung kelancaran pelaksanaan setiap tahapan. Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi, dapat diketahui bahwa implementasi TNDE di Kecamatan Purwosari telah menunjukkan perkembangan yang positif. Aspek komunikasi telah didukung oleh

sosialisasi dan dokumen resmi; aspek sarana telah didukung oleh aplikasi TNDE yang terintegrasi dengan GAPURA EMAS; aspek disposisi menunjukkan adanya penerimaan dan komitmen aparatur; sedangkan aspek struktur birokrasi telah memiliki SOP yang memberikan pedoman dalam pengelolaan surat. Keempat aspek tersebut menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan TNDE sebagai bagian dari administrasi pemerintahan berbasis elektronik. (Kuswarno, 2007)

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama sumber daya manusia dan mekanisme kewenangan disposisi. Keterbatasan jumlah personel serta ketergantungan terhadap pejabat tertentu dapat memengaruhi kecepatan proses administrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, pembagian tugas yang lebih optimal, serta penguatan mekanisme kerja diperlukan agar penggunaan TNDE dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi implementasi TNDE di Kecamatan Purwosari menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi terciptanya pengelolaan persuratan yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, komitmen aparatur, serta kejelasan struktur birokrasi. Optimalisasi keempat aspek tersebut diperlukan agar TNDE dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan serta mampu mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara lebih efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi GAPURA EMAS dalam Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Studi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan), dapat disimpulkan bahwa implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) melalui GAPURA EMAS telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan. Penerapan TNDE mendukung proses pengelolaan surat

masuk, surat keluar, dan administrasi persuratan secara lebih cepat, tertib, efisien, serta terdokumentasi. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal karena pada kondisi tertentu proses disposisi masih dilakukan secara manual menggunakan lembar disposisi fisik. Dari aspek komunikasi, implementasi TNDE telah didukung melalui kegiatan sosialisasi, surat internalisasi, dan surat edaran mengenai penggunaan sistem elektronik. Dari aspek sumber daya, Kecamatan Purwosari telah memiliki admin TNDE dan staf pengelola surat pada masing-masing seksi. Aplikasi TNDE juga telah terintegrasi dengan GAPURA EMAS serta dapat diakses melalui komputer maupun smartphone sehingga memberikan kemudahan bagi aparatur dalam melaksanakan administrasi persuratan. Dari aspek disposisi, aparatur menunjukkan komitmen dan kesediaan untuk beradaptasi dengan penggunaan sistem elektronik. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara elektronik. Faktor pendukung implementasi TNDE meliputi adanya sosialisasi dan pembinaan penggunaan sistem, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, integrasi aplikasi TNDE dengan GAPURA EMAS, komitmen aparatur, serta keberadaan SOP yang memberikan kejelasan dalam pelaksanaan administrasi persuratan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung penerapan SPBE di Kecamatan Purwosari.

Daftar Pustaka

- Alif, M. F. D. S. P., & Ahmadi, M. A. (2024). Peran Evaluasi Kinerja dalam Meningkatkan Motivasi Karyawan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 2(4), 192–203. <https://doi.org/10.60023/wyagpr49>
- Amalia, V. M., Warsito, L. 'Alam Q., & Aziz, H. (2025). Analisis Tantangan Dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia Timur. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 9(2), 412–426. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6416>
- Azhari, N. D., Kriswanto, N. A., & Arini, N. D. (2026). Efektivitas Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (1985), 4757–

4764.<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/7983/5978>

- Diandra, D. (2019). Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1340–1347. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1424>
- Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Nurmandi, A. (2018). Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Evaluasi terkini. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 24(2), 123–139.
- Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(4), 1011–1012. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609>
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 6(02), 639–658. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>.
- Hendika, A., Sanyoto, Y. W., Susanti, E., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., & Ilmu, S. (2026). Pengawasan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 03(01), 1511–1527. <http://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2227/1779>.
- Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Wacana Publik*, 1(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>.
- Khairani, I., & Feryansyah. (2026). Analisis Layanan Digital Dan Tabungan Emas Dalam Peningkatan Transaksi Di Pt Pegadaian Cabang Gerung. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis (Prakbis)*, 1(April), 1080–1090. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/prakbis/about>.
- Kuswarno, E. (2007). TRADISI FENOMENOLOGI PADA PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF Sebuah Pedoman Penelitian dari Pengalaman Penelitian. *Sosiohumaniora*, 9, 161–176.
- Maharani, P. I. R., Yanti, N. K. A. M., & Febriani, D. A. G. (2024). *E-Pecalang: Inovasi Sistem Keamanan Tradisional Berbasis Kelembagaan Digital Untuk Menjaga Bali*

Era Modern Menuju Indonesia Emas 2045. 2, 306–312.

- Mustaqem, I., & Rahman, A. (2024). Evaluasi Kriteria Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 2.
- Ridwan, M., Suyono, H., & Sarosa, M. (2013). Penerapan Data Mining Untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier. *Eccis*, 7(1), 59–64. <https://doi.org/10.1038/hdy.2009.180>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536/1131>.
- Saifullah Samad, Insan Tajali Nur, & Poppilea Erwinta. (2025). Optimalisasi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus Dprd Kabupaten Berau Tahun 2021–2023. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1014>.
- Saputra, I., & Rahmat, H. K. (2024). Evaluasi Kinerja Karyawan dalam Suatu Perusahaan: Sebuah Kajian Kepustakaan. *Journal of Current Research in Management*, 1(1), 19–24. <https://ejournal.hakhara-institute.com/index.php/MPSS>.
- Siregar, S., Zulham, Z., & Rahman, A. (2026). Pengelompokan Jenis Surat Masuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 5(1), 200–211. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v5i1.935>.
- Supriyanto, & Fitria, N. J. L. (2022). Penyuluhan Dan Sosialisasi Sistem Layanan "Portal Emas" Pada Mahasiswa Universitas Panca Marga. *MAFAZA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93–103. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/mafaza/article/view/446/275>.
- Suryana, T. B. M. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 37–53. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4944>.

- Tanjung, F. H. (2022). Penerapan Teori Administrasi Publik Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Ipal Komunal Di Jakarta. *Reksabumi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2922.2022>.
- Warman, N. S., Syamsir, Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 132–148. <https://badanpenerbit.org/index.php/MATEANDRAU/article/view/161/149>.
- Wulandari, A. P., & Pertiwi, V. I. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Untuk Mendorong Penerapan Smart Governance Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(1), 135–141. <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1>.
- Zuhriyah, A., Charizah, M., Huda, W. S., Amrulloh, M. F., Zulham, A., & Havy, F. (2026). Transformasi Digital Desa melalui Pengelolaan Website dan Pemberdayaan UMKM. *Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1). http://ejournal.unwaha.ac.id/abdimas_if/article/view/7196/3106.